

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Efisiensi Menunggu Dasar Hukum

Efisiensi APBD DKI 2020 yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta belum mempunyai landasan hukum. Akibatnya, pembahasannya di Komisi D DPRD DKI Jakarta dihentikan.

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah komisi di DPRD DKI Jakarta mulai menggelar rapat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Rancangan APBD 2020 bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Senin (28/10/2019).

Di Komisi D DPRD DKI, rapat dihentikan di awal karena belum ada revisi Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 61 Tahun 2019 tentang rencana kerja pemerintah daerah tahun 2020. Aturan ini menjadi dasar hukum penyusunan KUA-PPAS DKI tahun 2020.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik yang ikut memimpin rapat mengatakan, pergub itu perlu direvisi sebelum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan KUA-PPAS hasil efisiensi.

"Kalau kita membahas sekarang, tidak sesuai aturan karena belum ada dasar aturannya. Pergub itu dibuat untuk KUA-PPAS yang belum revisi," katanya dalam rapat.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengatakan, dengan kondisi itu, pemprov belum siap untuk membahas anggaran 2020. Sementara DPRD DKI sudah siap membahasnya.

Menurut Ida, terjadinya defisit pemasukan dari target tahun ini perlu menjadi pelajaran pada masa mendatang

agar Pemprov DKI tidak menetapkan target pemasukan terlalu tinggi. "Realistis saja menetapkan target," katanya.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, pemasukan tahun ini defisit sekitar Rp 6 triliun dari target pemasukan tahun 2019. "Kami pertanyakan, apa terobosan-terobosan terkait itu," ujar Edi se usai memimpin rapat di Komisi C DPRD DKI.

Edi mengatakan, defisit pemasukan dari target itu sudah disampaikan pemprov ke DPRD. Surat edaran dari Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta juga sudah diedarkan terkait dengan efisiensi.

Pemprov DKI telah melakukan penyisiran rancangan anggaran untuk efisiensi selama dua hari, pekan lalu. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Yusmada Faizal membenarkan, dari sektor pembangunan dan lingkungan hidup sudah dihitung potensi indikatif efisiensi anggaran dari Rp 17,99 triliun menjadi Rp 16,339 triliun. Ada potensi indikatif penghematan sebesar Rp 1,651 triliun.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Deftrianov dalam rapat mengatakan, penyisiran sudah dilakukan hingga ke detail mata anggaran. Untuk Dinas Bina Marga DKI Jakarta,

misalnya, potensi indikatif efisiensi anggaran terdapat pada pembebasan lahan.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan, penyisiran dilakukan berdasarkan skala prioritas. Program prioritas, seperti trotoar, tak akan terkena efisiensi. Adapun pembebasan lahan, di antaranya untuk proyek jalan tembus dan alat berat, berpotensi diefisiensikan.

Dari hasil penyisiran, rancangan anggaran Dinas Marga DKI Jakarta hasil revisi sebesar Rp 3,99 triliun dari awalnya Rp 4,2 triliun.

Defisit

APBD Perubahan 2019 DKI Jakarta hampir dipastikan defisit menjelang penutupan tahun. Penerimaan pajak daerah yang jauh dari target serta dana bagi hasil senilai Rp 6,39 triliun dari pemerintah pusat yang tidak kunjung cair adalah penyebabnya. Pemprov harus memangkas anggaran belanja hingga Rp 2,3 triliun. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menyisir kegiatan. "Perjalanan dinas jangan terlalu sering," ujar Saefullah, Kamis (24/10).

Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI mencatat, hingga 17 Oktober, realisasi penerimaan pajak daerah Rp 31,56 triliun dari target Rp 44,54 triliun. (IRE/BOW)